

ABSTRAK

Pembatalan perjanjian yang secara sepihak ialah dimana tidak bersedianya diantara salah satu pihak buat memenuhi kewajibanya yang telah disepakati diantara kedua belah pihak dalam perjanjian. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini menetapkan rumusan masalah tentang pembatalan perjanjian menurut KUHPerdara dan Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang di lakukan oleh PT Changshin Indonesia Terhadap PT Harmoni Raksa Husada Pada Kasus Nomor 124/pdt.g/2021PNkwwg. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya terjadi yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dapat di simpulkan dari penelitian ini bahwa Pembatalan Perjanjian harus memuat syarat pembatalan yaitu syarat timbal balik, artinya perjanjian tersebut harus mengandung hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Persyaratan di atas harus dipenuhi untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, sedangkan untuk perjanjian yang batal demi hukum, perjanjian tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. oleh karena itu perikatan yang lahir dari undang-undang tersebut sifatnya impressive karena di sertai dengan sanksi dan tidak bisa di sampingi dengan perjanjian. jadi ada dua yang dapat terjadi ketika ada satu peraturan perundang undangan yang menghapus ada akibatnya, kemudian disepakati untuk diakhiri ataukah diakhirinya bukan oleh kesepakatan tapi karena alasan alasan yang ditentukan undang undang.

Kata kunci: perjanjian kerjasama, pembatalan perjanjian, Akibat hukum pembatalan perjanjian.

KARAWANG

ABSTRACT

Unilateral cancellation of an agreement is where one of the parties is unwilling but fulfills the obligations agreed between the two parties in the agreement. In this research, the author explains the formulation of the problem regarding cancellation of agreements according to the Civil Code and the consequences of the cancellation of the agreement carried out by PT Changshin Indonesia against PT Harmoni Raksa Husada in case number 124/pdt.g/2021PNkwwg. This writing uses normative juridical research, namely by studying and exploring and looking for answers about what should happen which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. using descriptive qualitative research methods. It can be concluded from this research that the cancellation of an agreement must contain conditions for cancellation, namely reciprocal conditions, meaning that the agreement must contain rights and obligations for both parties. The above requirements must be met for an agreement that can be cancelled, whereas for an agreement that is null and void, the agreement is invalid and is deemed to have never existed. Therefore, the obligations that arise from this law are impressive because they are accompanied by sanctions and cannot be accompanied by agreements. So there are two things that can happen when there is a statutory regulation that eliminates the consequences, then it is agreed to end it or whether it is ended not by agreement but for reasons determined by law.

Keywords: *cooperation agreement, cancellation of the agreement, Legal consequences of canceling the agreement.*